

PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT September 2017



PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT September 2017



<https://jabar.bps.go.id>

PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT SEPTEMBER 2017

ISBN : 978-602-51377-5-4
Katalog BPS : 3205011.32
No. Publikasi : 32520.1801
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : xii + 20 halaman

Naskah :

Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit :

Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan oleh :

©Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Dicetak oleh :

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT SEPTEMBER 2017

Tim Penyusun

Penanggung Jawab Umum : Ir. Dody Herlando, M.Econ

Penanggung Jawab Teknis : Ir. Raden Gandari Adianti Aju Fatimah, M.Si

Penulis & Pengolah Data : Esti Suciningtyas Pratiwi, S.ST

Penyunting/Editor : 1. Yayat Hidayat, S.ST, M.Stat.

2. Vira Wahyuningrum, S.ST, M.Stat.

KATA PENGANTAR

Salah satu permasalahan utama yang terjadi di Indonesia adalah kemiskinan. Untuk membuat suatu kebijakan yang tepat dalam rangka penanggulangan kemiskinan diperlukan suatu data kemiskinan yang menyeluruh.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat telah merilis tingkat kemiskinan makro provinsi sejak tahun 2007. Mulai tahun 2011, BPS Provinsi Jawa Barat merilis tingkat kemiskinan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yaitu keadaan Bulan Maret dan Bulan September. Untuk melengkapi ulasan yang disajikan pada Berita Resmi Statistik (BRS), BPS Provinsi Jawa Barat menyusun Laporan Eksekutif yang mengupas lebih dalam data kemiskinan. Laporan Eksekutif BRS kemiskinan keadaan September 2017, disajikan dalam bentuk Publikasi "Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Barat September 2017".

Diharapkan laporan ini dapat memberikan pemahaman tentang tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Semoga bermanfaat.

Bandung, Februari 2018

Kepala,



Dody Herlando

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
I. Pendahuluan	1
II. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Barat (September 2016 - September 2017)	3
III. Perubahan Garis Kemiskinan September 2016 – September 2017	8
IV. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	13
V Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Provinsi Jawa Barat (September 2016 – September 2017)	16
VI. Penutup	19
Daftar Pustaka	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Barat Menurut Daerah September 2016 – September 2017	3
Tabel 2.	Komoditi yang Memberi Pengaruh Besar pada Garis Kemiskinan, September 2017	11

<https://jabar.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat menurut Klasifikasi Daerah, September 2016 – September 2017	5
Gambar 2.	Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia, September 2017	6
Gambar 3.	Perkembangan Garis Kemiskinan (Rupiah per kapita per bulan) Provinsi Jawa Barat, September 2016 – September 2017	8
Gambar 4.	Garis Kemiskinan dan Peranan Komoditi Makanan/Non Makanan Provinsi Jawa Barat pada September 2017	9
Gambar 5.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Barat, September 2016 – September 2017	14
Gambar 6.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Barat, September 2016 – September 2017	15
Gambar 7.	Perkembangan Gini Ratio Provinsi Jawa Barat Menurut Klasifikasi Daerah, September 2016 – September 2017	16
Gambar 8.	Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi Jawa Barat pada September 2017	17

I. Pendahuluan

Salah satu poin kesepakatan dari seluruh bangsa di dunia yang tertuang dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) adalah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan sampai pada pertengahan tahun 2015. Di berbagai Negara, upaya untuk menekan angka kemiskinan juga masih belum menunjukkan capaian yang memuaskan. Hingga pada bulan September 2015, para pemimpin dunia menyepakati tujuan pembangunan global dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan kemiskinan masih merupakan salah satu poin penting yang ada dalam SDGs.

Kemiskinan sebagai salah satu poin untuk mengukur tingkat keberhasilan MDGs dan SDGS di suatu Negara. Namun, untuk mengukur kemiskinan diperlukan suatu konsep yang jelas. BPS sendiri memakai konsep kemiskinan yang dilihat dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Kemiskinan juga dipandang sebagai ketidakmampuan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Suatu penduduk dikatakan merupakan penduduk miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan suatu representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Kemiskinan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan itu

diwakili oleh 52 jenis komoditi yang meliputi padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain. Sedang Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Sumber data utama dalam menghitung Garis Kemiskinan adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Garis Kemiskinan yang dihasilkan hanya menggambarkan kondisi kemiskinan penduduk secara makro dikarenakan sumber data yang dipakai hanya berdasarkan survei. Kemiskinan makro ini tidak dapat menggambarkan siapa dan keberadaan penduduk miskin tersebut. Namun demikian, kemiskinan makro dapat digunakan untuk menggambarkan kemiskinan di suatu daerah serta membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah sehingga pemerintah bisa mengambil kebijakan untuk mengatasi kemiskinan tersebut dan juga bisa untuk evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Selama ini, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sudah dengan gencar melakukan berbagai program untuk penanggulangan kemiskinan. Anggaran yang begitu besar pun digulirkan untuk program pengentasan kemiskinan. Namun, berbagai program penanggulangan kemiskinan menjadi tidak efektif manakala di satu sisi pemerintah pun mengeluarkan kebijakan yang tidak pro dengan kemiskinan seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah, kenaikan tarif dasar listrik serta akses infrastruktur yang kadang menghambat penduduk untuk mendapatkan informasi dan pelayanan umum baik di bidang kesehatan, pendidikan maupun yang lainnya. Kondisi seperti ini terjadi di hampir

seluruh wilayah Indonesia termasuk Jawa Barat yang secara geografis dekat dengan ibukota Negara Republik Indonesia.

II. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Barat (September 2016 – September 2017)

Perkembangan tingkat kemiskinan pada kurun waktu bulan September 2016 – September 2017 di Jawa Barat menunjukkan kecenderungan menurun. Pada keadaan September 2016, persentase penduduk miskin di Jawa Barat mencapai 8,77 persen (4,17 juta jiwa). Dan pada keadaan Maret 2017 mengalami penurunan sebesar 0,06 poin menjadi 8,71 persen (4,17 juta jiwa). Penurunan yang terjadi selama kurun waktu September 2016 – Maret 2017 menunjukkan bahwa kondisi perekonomian di Jawa Barat mengalami perubahan ke arah yang positif.

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Barat Menurut Daerah, September 2016 – September 2017

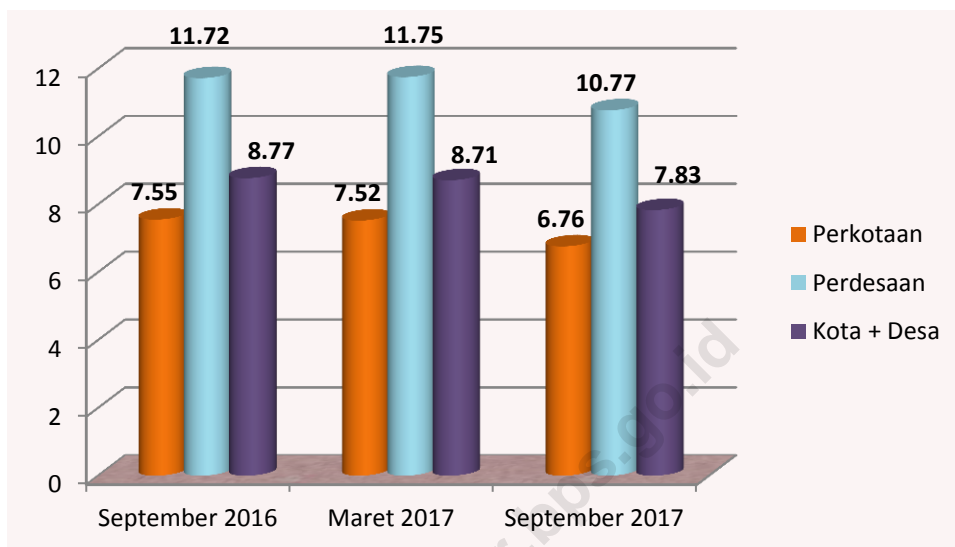
Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
September 2016	2.54	7.55
Maret 2017	2.59	7.52
September 2017	2.39	6.76
Perdesaan		
September 2016	1.62	11.72
Maret 2017	1.58	11.75
September 2017	1.38	10.77
Kota + Desa		
September 2016	4.17	8.77
Maret 2017	4.17	8.71
September 2017	3.77	7.83

Sumber : Data Susenas 2016-2017

Pada September 2017, persentase penduduk miskin di Jawa Barat kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan keadaan Maret 2017 yaitu 0,88 poin. Jika dilihat selama kurun waktu September 2016 - September 2017, persentase penduduk miskin Jawa Barat mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 0,94 poin. Tentu saja hal ini merupakan berita yang cukup menggembirakan dan boleh dikatakan bahwa pemerintah telah berhasil dalam program pengentasan kemiskinan selama periode September 2016 – September 2017.

Secara absolut dalam kurun waktu setahun terakhir selama periode September 2016 – September 2017, penduduk miskin Jawa Barat terjadi penurunan sekitar 394 ribu jiwa yaitu dari 4,17 juta jiwa menjadi 3,77 juta jiwa. Penurunan ini terjadi baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Di daerah perdesaan, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 242 ribu jiwa (dari 1,62 juta jiwa menjadi 1,38 juta jiwa). Hal yang sama juga terjadi di perkotaan di mana secara absolut mengalami penurunan sekitar 152 ribu jiwa (dari 2,54 juta jiwa menjadi 2,39 juta jiwa).

Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat Menurut Klasifikasi Daerah, September 2016 – September 2017



Sumber : Data Susenas 2016-2017

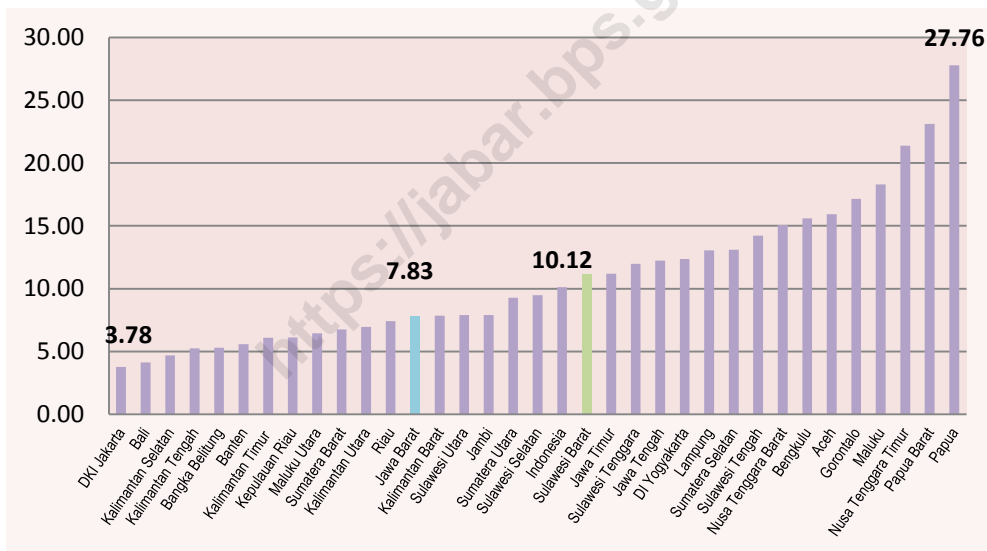
Jika dilihat dari persentase, selama periode September 2016 – September 2017, penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan turun sebesar 0,95 persen (11,72 persen menjadi 10,77 persen). Dan di daerah perkotaan turun sebesar 0,79 persen (dari 7,55 persen menjadi 6,76 persen). Untuk periode Maret 2017 – September 2017, penduduk miskin di perdesaan juga turun 0,98 persen (dari 11,75 persen menjadi 10,77 persen), di perkotaan turun sebesar 0,76 persen yaitu dari 7,52 persen menjadi 6,76 persen (Gambar 1).

Secara umum, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan jauh lebih besar daripada daerah perkotaan. Salah satu penyebabnya diduga karena akses dan infrastruktur yang belum memadai di daerah perdesaan. Selain itu, bisa dimungkinkan karena kualitas sumber daya manusia di perdesaan masih lebih rendah dibandingkan perkotaan. Namun

demikian, perbedaan perkembangan kemiskinan di perdesaan selama kurun waktu September 2016 – September 2017 semakin menyempit. Ini menunjukkan bahwa perekonomian di daerah perdesaan sudah mulai menggalat.

Dari gambaran kondisi ini, pemerintah masih punya pekerjaan rumah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pemerintah harus bisa mengendalikan stabilitas harga khususnya kebutuhan pokok sehingga kemampuan daya beli masyarakat bisa tetap terjaga.

Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia, September 2017



Sumber : Data Susenas 2017

Jika dibandingkan dengan angka persentase penduduk miskin Indonesia, Jawa Barat memiliki nilai yang lebih kecil dari angka nasional. Jika dilihat dari urutan persentase penduduk miskin yang terkecil, Provinsi Jawa Barat menempati urutan ke-13. Persentase penduduk miskin yang

terendah di Indonesia ditempati Provinsi DKI Jakarta dengan angka 3,78 persen dan yang terbesar yaitu Provinsi Papua dengan 27,76 persen. Jika dilihat dari provinsi yang ada di Pulau Jawa, persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat menempati posisi ketiga terkecil setelah DKI Jakarta dan Banten (Gambar 2).

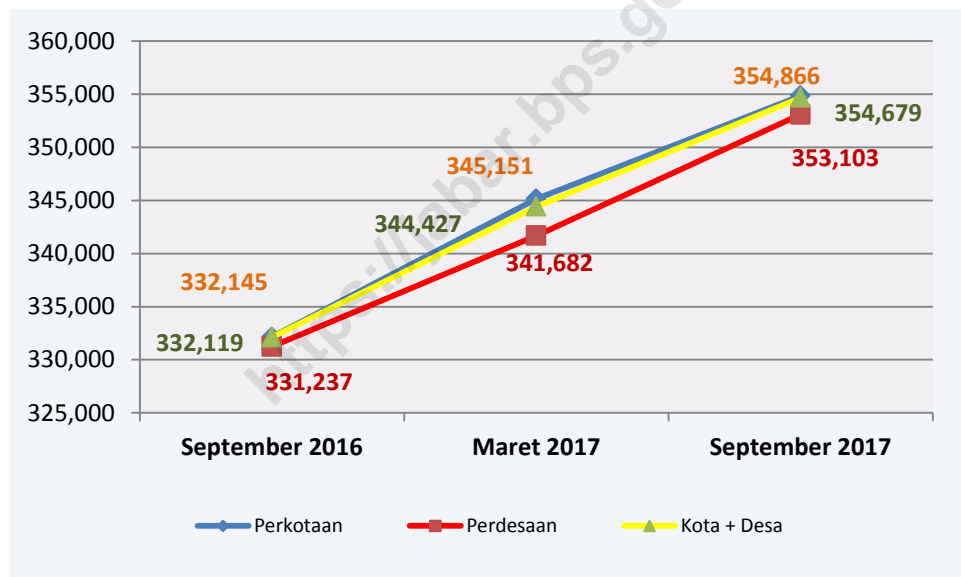
Penurunan persentase kemiskinan yang cukup tajam pada kurun waktu Maret – September 2017 (0,88 persen), patut diduga bahwa program pemerintah di bidang ekonomi cukup berhasil dalam pengentasan kemiskinan di Jawa Barat. Hal ini digambarkan dari data makro ekonomi yang mendukung penurunan persentase penduduk miskin, diantaranya :

1. Selama periode April – September 2017, inflasi umum di Jawa Barat cukup rendah yaitu sebesar 1,68 persen. Dibandingkan inflasi periode sebelumnya (Oktober 2016 – Maret 2017) sebesar 2,21 persen.
2. Nilai Tukar Petani (NTP) pada kondisi September 2017 mengalami kenaikan sebesar 3,61 poin dibandingkan kondisi Maret 2017 yaitu dari 102,37 menjadi 105,98.
3. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat selama Triwulan III sebesar 5,19 persen.
4. Dalam periode Februari – Agustus 2017, terjadi kenaikan cukup signifikan pada rata-rata upah riil pekerja bebas baik pertanian (18,76 persen) maupun non pertanian (10,31 persen).
5. Walaupun secara tidak langsung, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka juga diduga berpengaruh pada turunnya angka kemiskinan di Jawa Barat. Pada Agustus 2017, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat mencapai angka 8,22 persen. Angka ini turun sebesar 0,27 poin dari kondisi Februari 2017 yang mencapai 8,49 persen.

III. Perubahan Garis Kemiskinan September 2016 – September 2017

Dalam proses penghitungan, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Batasan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama kurun waktu setahun dari September 2016 – September 2017, Garis Kemiskinan di Jawa Barat naik dari Rp. 332.119,- per kapita per bulan menjadi Rp. 354.679,- per kapita per bulan.

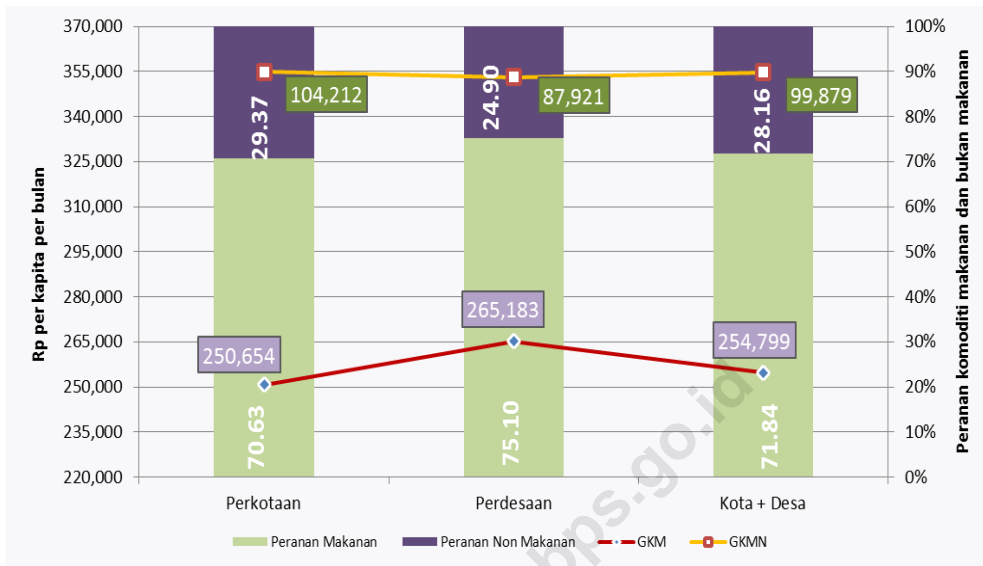
Gambar 3. Perkembangan Garis Kemiskinan (Rupiah per kapita per bulan) Provinsi Jawa Barat, September 2016 – September 2017



Sumber : Data Susenas 2016-2017

Apabila dilihat berdasarkan klasifikasi daerah di Jawa Barat, selama kurun waktu September 2016 – September 2017 Garis Kemiskinan perkotaan kenaikannya lebih tinggi yaitu dari Rp. 332.145,- per kapita per bulan menjadi Rp. 354.866,-. Sedangkan Garis Kemiskinan perdesaan mengalami kenaikan dari Rp 331.237,- menjadi Rp. 353.103,- (Gambar 3).

Gambar 4. Garis Kemiskinan dan Peranan Komoditi Makanan/Non Makanan Provinsi Jawa Barat pada September 2017



Sumber : Data Susenas 2017

Garis Kemiskinan terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Pada September 2017, secara total Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 254.799,- per kapita per bulan dan Garis Kemiskinan Non Makanan sebesar Rp 99.879,-. Jika dibedakan antara perkotaan dan perdesaan, Garis Kemiskinan Makanan di perdesaan (Rp 265.183,-) lebih tinggi dibandingkan Garis Kemiskinan Makanan di perkotaan (Rp 250.654,-). Tetapi sebaliknya, untuk Garis Kemiskinan Non Makanan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan yaitu Rp 104.212,- berbanding Rp 87.921,- (Gambar 4).

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan sangat dominan dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat pada tingkat ekonomi rendah lebih dominan untuk pengeluaran kebutuhan makanan dibandingkan non makanan. Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan (GK) sebesar 70,63 persen untuk daerah perkotaan. Sedangkan di daerah perdesaan sebesar 75,10 persen. Adapun secara total peranan komoditi makanan terhadap GK adalah sebesar 71,84 persen.

Untuk membandingkan angka kemiskinan antar Negara, Bank Dunia menghitung Garis Kemiskinan dengan menggunakan estimasi konsumsi yang dikonversikan ke dalam US\$ PPP (*Purchasing Power Parity* atau paritas daya beli), bukan nilai tukar US\$ resmi. Angka konversi PPP ini menunjukkan banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa di mana jumlah yang sama tersebut dapat dibeli seharga US\$ 1 di Amerika. Ukuran Bank Dunia ini memilah dua batasan penduduk miskin yaitu di bawah US\$ 1 PPP per kapita per hari dan di bawah US\$ 2 PPP per kapita per hari.

Tabel 2. Komoditi yang Memberi Pengaruh Besar pada Garis Kemiskinan, September 2017

Komoditi		Perkotaan	Komoditi	Perdesaan
(1)		(2)	(3)	(4)
Makanan				
1	Beras	22.10	Beras	27.06
2	Rokok kretek filter	9.82	Rokok kretek filter	9.45
3	Daging sapi	4.34	Telur ayam ras	4.20
4	Daging ayam ras	4.17	Daging ayam ras	2.90
5	Telur ayam ras	3.94	Roti	2.62
Non Makanan				
1	Perumahan	9.33	Perumahan	9.41
2	Bensin	4.89	Bensin	2.85
3	Listrik	3.57	Listrik	1.99
4	Pendidikan	2.12	Perlengkapan Mandi	1.21
5	Angkutan	1.26	Pendidikan	1.07

Sumber : Data Susenas 2017

Jika dilihat pada komoditi yang menjadi penyumbang terbesar Garis Kemiskinan pada September 2017 baik itu di daerah perkotaan maupun di perdesaan, beras menjadi komoditi dengan urutan pertama. Di perkotaan, beras mencapai angka 22,10 persen sedang di perdesaan mencapai 27,06 persen. Hal ini dikarenakan makanan utama dari sebagian besar penduduk Indonesia adalah beras, sehingga menjadi sangat penting bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras.

Posisi kedua terbesar sebagai penyumbang Garis Kemiskinan adalah rokok kretek filter. Kondisi ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Sebenarnya kalau dilihat makanan yang menghasilkan kalori, rokok kretek tidak termasuk dalam hal ini. Namun karena rokok kretek ini

banyak dikonsumsi oleh penduduk miskin sehingga tetap dimasukkan dalam penghitungan Garis Kemiskinan. Komoditi rokok kretek filter memberikan sumbangan sebesar 9,82 persen untuk daerah perkotaan dan 9,45 persen di perdesaan.

Untuk komoditi selanjutnya terdapat perbedaan antara perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan, daging sapi menempati urutan ketiga dengan 4,34 persen menyumbang Garis Kemiskinan. Komoditi yang menyumbang Garis Kemiskinan selanjutnya di perkotaan adalah daging ayam ras (4,17 persen) dan telur ayam ras (3,94 persen). Sedangkan di perdesaan, komoditi selanjutnya setelah rokok kretek adalah telur ayam ras (4,20 persen), diikuti oleh daging ayam ras (2,90 persen) dan roti di urutan kelima dengan 2,62 persen.

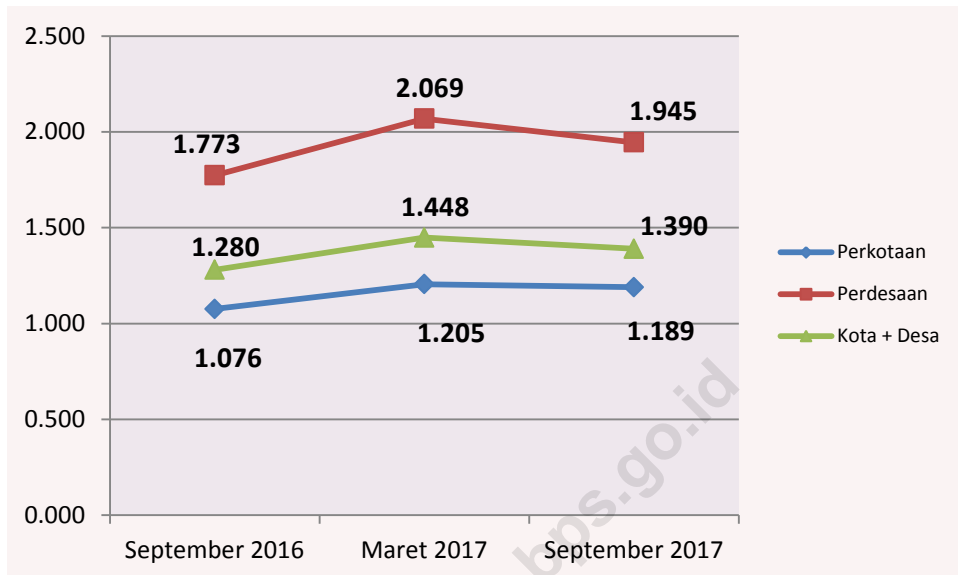
Untuk komoditi bukan makanan yang memberi sumbangan terbesar untuk Garis Kemiskinan di daerah perkotaan adalah perumahan yaitu sebesar 9,33 persen, bensin 4,89 persen, listrik 3,57 persen, pendidikan 2,12 persen dan angkutan sebesar 1,26 persen. Sedangkan lima komoditi bukan makanan penyumbang terbesar terhadap Garis Kemiskinan di daerah perdesaan secara berturut-turut adalah perumahan yaitu sebesar 9,41 persen, bensin 2,85 persen, listrik 1,99 persen, perlengkapan mandi sebesar 1,21 persen, dan pendidikan 1,07 persen.

IV. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Menurut Sistem Informasi Rujukan Statistik (Sirus) Badan Pusat Statistik (BPS), nilai dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) ini dapat digunakan untuk menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1), semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Sedang Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

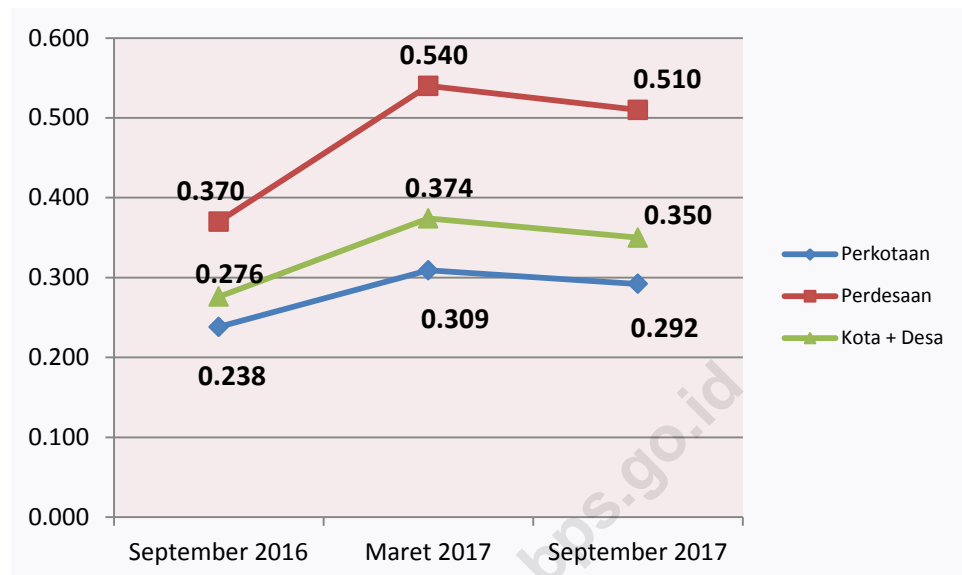
**Gambar 5. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Provinsi Jawa Barat, September 2016 – September 2017**



Sumber : Data Susenas 2016-2017

Pada periode Maret 2017 – September 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun tipis dari 1,448 pada keadaan Maret 2017 menjadi 1,390 pada keadaan September 2017. Penurunan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati Garis Kemiskinan. Pada periode yang sama, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) wilayah perdesaan mengalami penurunan yaitu dari 2,069 turun menjadi 1,945. Sedangkan di wilayah perkotaan mengalami penurunan dari 1,205 menjadi 1,189 (Gambar 5). Apabila dilihat secara keseluruhan, Indeks P1 di perkotaan pada umumnya lebih rendah dibandingkan dengan P1 di perdesaan. Ini bisa menjelaskan bahwa kondisi kemiskinan di daerah perkotaan lebih baik daripada di perdesaan.

**Gambar 6. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Provinsi Jawa Barat, September 2017 – Maret 2017**



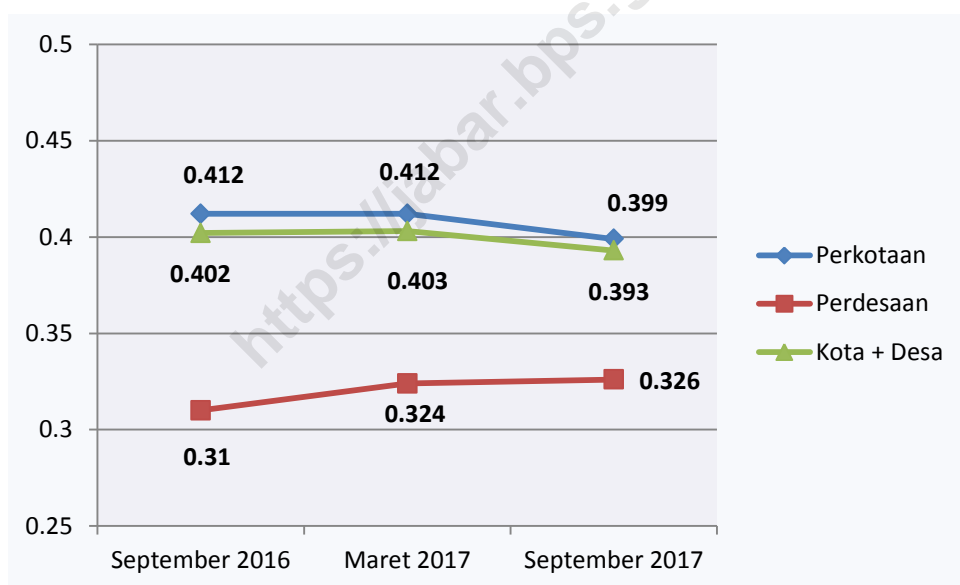
Sumber : Data Susenas 2016-2017

Dari hasil Susenas 2017, pada keadaan bulan September 2017 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Barat mencapai 0,350. Nilai ini mengalami penurunan tipis sebesar 0,024 poin dibandingkan pada Maret 2017 (0,374). Ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin cenderung semakin menyempit. Pada kurun waktu yang sama, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di wilayah perkotaan turun dari 0,309 menjadi 0,292. Hal yang sama juga terjadi di perdesaan, dari 0,540 menjadi 0,510. (Gambar 6).

V. Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Provinsi Jawa Barat (September 2016 – September 2017)

Salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat adalah distribusi pendapatan penduduk. Dikarenakan data mengenai pendapatan sulit diperoleh, maka pengukuran distribusi pendapatan selama ini menggunakan pendekatan data pengeluaran. Banyak ukuran yang digunakan untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan, salah satunya dengan *Gini Ratio*. Nilai *Gini Ratio* ini berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Gambar 7. Perkembangan Gini Ratio Provinsi Jawa Barat Menurut Klasifikasi Daerah, September 2016 – September 2017



Sumber : Data Susenas 2016-2017

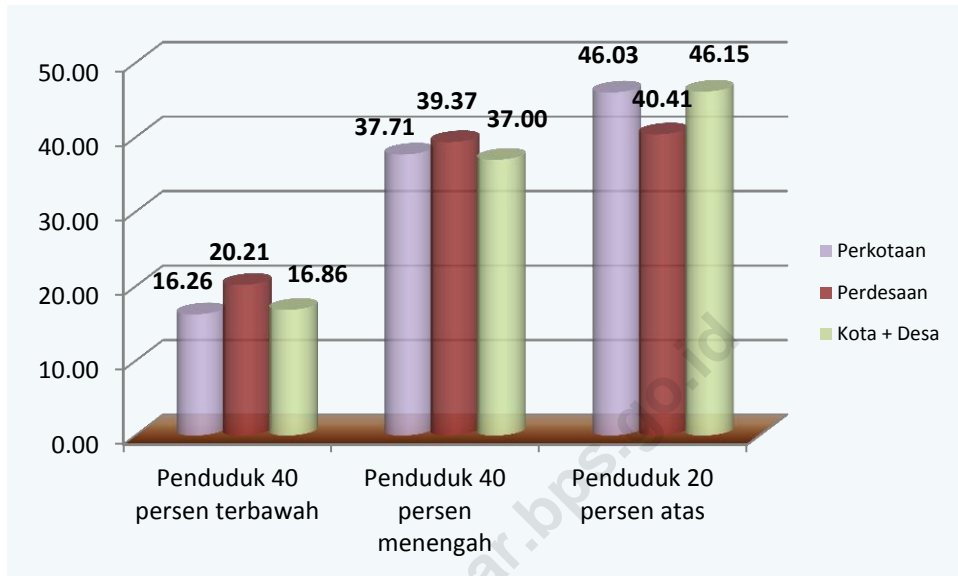
Perkembangan *Gini Ratio* Provinsi Jawa Barat periode September 2016 – September 2017 mengalami penurunan. Ini merupakan fenomena yang cukup baik. Dengan semakin menurunnya *Gini Ratio* ini dapat diartikan

bahwa distribusi pendapatan penduduk Jawa Barat semakin merata. Pada September 2016, *Gini Ratio* Provinsi Jawa Barat sebesar 0,402 dan mengalami penurunan pada September 2017 menjadi 0,393.

Jika dilihat berdasarkan klasifikasi wilayah, dalam kurun waktu September 2016 – September 2017, daerah perkotaan cenderung mempunyai angka *Gini Ratio* yang stabil pada bulan September 2016 dan Maret 2017 yaitu 0,412. Namun pada September 2017, angka *Gini Ratio* daerah perkotaan mulai menunjukkan perbaikan turun menjadi 0,399. Lain halnya dengan perkembangan *Gini Ratio* wilayah perdesaan yang cenderung mengalami kenaikan. Pada September 2016, *Gini Ratio* di perdesaan sebesar 0,310 naik menjadi 0,324 pada Maret 2017 dan kemudian naik lagi menjadi 0,326 pada bulan September 2017.

Selain menggunakan *Gini Ratio*, salah satu ukuran yang bisa digunakan untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah itu nilainya ada di bawah 12 persen, kemudian ketimpangan sedang jika nilainya berkisar antara 12-17 persen serta ketimpangan rendah jika nilainya berada di atas 17 persen.

Gambar 8. Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi Jawa Barat pada September 2017



Sumber : Data Susenas 2017

Pada September 2017, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di Jawa Barat adalah 16,86 persen. Ini berarti Jawa Barat berada pada kategori ketimpangan sedang hampir mendekati kategori rendah. Jika dilihat berdasarkan klasifikasi wilayah, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di daerah perkotaan Provinsi Jawa Barat mencapai 16,26 persen (ketimpangan sedang). Di daerah perdesaan termasuk kategori ketimpangan rendah dengan angka persentase pengeluaran kelompok 40 persen terbawah mencapai 20,21 persen.

VI. Penutup

Pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin atau penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Barat sebesar 3,774 juta jiwa (7,83 persen). Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 0,88 persen jika dibandingkan keadaan bulan Maret 2017 dan menurun 0,94 persen jika dibandingkan kondisi September 2016.

Garis Kemiskinan (GK) Jawa Barat pada bulan September 2017 sebesar Rp 354.679,- per kapita per bulan. Ini mengalami peningkatan jika dibandingkan kondisi Maret 2017 (Rp 344.427,- per kapita per bulan) dan kondisi September 2016 (Rp 332.119,- per kapita per bulan). Pada bulan September 2017, peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan (GK) masih mendominasi dibandingkan komoditi bukan makanan. Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan (GK) sebesar 71,84 persen.

Pada periode September 2016 – September 2017, perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Jawa Barat sangat fluktuatif. Pada September 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Jawa Barat mencapai angka 1,390. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi Maret 2017 yaitu 1,448. Hal ini mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Jawa Barat pada September 2017 cenderung mendekati dari Garis Kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), pada periode September 2017 mencapai nilai 0,350 sedikit lebih rendah dibandingkan kondisi Maret 2017 yaitu 0,374. Penurunan nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada September 2017 ini menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin di Jawa Barat cenderung menyempit.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, 2017. *Berita Resmi Statistik* No. 05/01/32/Th.XX, 2 Januari 2018, Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Badan Pusat Statistik, 2017. *Perkembangan Tingkat Kemiskinan Jawa Barat*, Maret 2017, Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

<https://jabar.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://jabar.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT**
J. Pura, Bandung 40132, Jawa Barat
Telp. 022 7212595, 022 7201886, Faks. 022 7213572
E-Mail: bps3203@bps.go.id
Website: <http://jabar.bps.go.id>

ISBN 978-602-51377-5-4



9 786025 137754